

## Survei Capres Indekstat: Ganjar 16,5%, Prabowo 11,6%, Anies Baswedan 9,9%

JAKARTA (IM) - Lembaga survei Indekstat merilis hasil survei terhadap elektabilitas calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Dalam survei tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di urutan pertama.

Survei Indekstat yang dirilis, Minggu (6/11), dengan sampel 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan protokol kesehatan pada 10-19 Oktober.

Responden diberikan pertanyaan: Jika pemilihan presiden (pilpres) dilaksanakan hari ini, dari 12 nama calon berilah siapa yang akan ibu/bapak pilih? Apa hasilnya?

"Peta konstelasi elektoral Calon Presiden hari ini menunjukkan bahwa jika pemilihan umum (pemilu) diadakan sekarang, tidak ada perubahan yang cukup massif terjadi terkait elektabilitas tokoh-tokoh yang ada. Ganjar, Prabowo dan Anies masih menjadi 3 kandidat terkuat dengan elektabilitas tertinggi saat ini," kata Deputy Direktur Eksekutif Indekstat Rikola Fedri di Morrisey Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (6/11).

Dalam survei dengan simulasi top of mind ini, Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas tertinggi dengan persentase 16,5%. Selanjutnya ada nama Prabowo

Subianto di posisi kedua dengan perolehan elektabilitas 11,6% dan disusul oleh Anies Baswedan di posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 9,9%.

"Temuan menarik dalam survei kami adalah, sejak setahun lalu di Oktober 2021, sebanyak 80% pemilih di Indonesia sudah menentukan pilihan Calon Presidennya dan semakin meruncit hingga hari ini ke tiga calon," ucap Rikola.

Berikut hasil lengkap survei elektabilitas capres: Ganjar Pranowo 16,5%, Prabowo Subianto 11,6%, Anies Baswedan 9,9%, Ridwan Kamil 2,3%,

Puan Maharani 1,6%, Sandiaga Uno 1,5%, AHY 1,3%, Andika Perkasa 0,8%,

Cak Imin 0,6%, Khofifah Indar Parawansa 0,6%, Erick Thohir 0,3%, Airlangga Hartato 0,1%, dan lainnya 2,7%, Merahasiakan jawaban 1,6%, Tidak tahu 10,3%

Hasil tidak jauh berbeda juga didapatkan dalam survei elektabilitas capres dengan simulasi tertutup. Ganjar masih memimpin, disusul oleh Prabowo dan Anies.

Berikut hasil survei tersebut: Ganjar Pranowo 27,2%, Prabowo Subianto 21,5%,

Anies Baswedan 17,0%, Ridwan Kamil 8,3%, Sandiaga Uno 4,3%, Andika Perkasa 3,1%, AHY 2,7%, Puan Maharani 1,6%, Cak Imin 1,4%, Erick Thohir 0,9%, Airlangga Hartato 0,2%, Zulhas 0,2%, Merahasiakan jawaban: 3,0%. Tidak tahu: 8,1%. ● han

## KPU Pelajari Putusan Bawaslu yang Kabulkan Gugatan 5 Papprol

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya tengah mempelajari hasil putusan sidang adjuikasi penyelesaian sengketa, yang mengabulkan permohonan lima parpol terkait hasil rekapitulasi verifikasi administrasi oleh KPU.

"Kami sebenarnya sedang mempelajari ya, bahwa putusan Bawaslu tersebut yang mengabulkan sebagian permohonan partai politik," kata Hasyim usai melakukan kunjungan ke Kantor KPU Provinsi Bali, Sabtu (5/11).

Hasyim mengaku telah membaca putusan tersebut yang menegaskan bahwa parpol diberikan kesempatan kembali untuk melengkapi syarat administratif yang sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. Dimana, parpol tersebut diberi kesempatan untuk melengkapi syarat administratif 1x24 jam setelah jadwal ditentukan KPU.

Kendati demikian, Hasyim menjelaskan jika KPU harus melaksanakan putusan itu tiga hari kerja setelah dibacakan.

"Kalau kemudian tiga hari itu hari adalah hari kerja, berarti kan Jumat, Senin, Selasa. Sehingga dibuka 1x24 jam sejak

dibuka sampai hari Rabu ya," ujarnya.

Untuk diketahui, dalam sidang adjuikasi, Bawaslu mengabulkan pokok permohonan untuk sebagian yang diajukan lima partai politik (parpol). Kelima parpol tersebut yakni Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Republik, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Suara Rakyat Indonesia Indonesia (Parsindo), dan Partai Partai Republik Indonesia.

"Satu, memutuskan dalam pokok perkara mengabulkan pokok permohonan untuk sebagian," kata Ketua Majelis Sidang Rahmat Bagja dalam tiap sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Jumat 4 November 2022.

Putusan ini pula membatalkan berita acara (BA) KPU mengenai hasil rekapitulasi verifikasi administratif yang sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. Dimana, parpol tersebut diberi kesempatan untuk melengkapi syarat administratif 1x24 jam setelah jadwal ditentukan KPU.

"Tiga, memerintahkan termohon (KPU) agar memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen perbaikan selama 1x24 jam," ujarnya. ● han

## Dosen Gugat UU PSK ke MK, Minta Saksi Ahli Tak Bisa Dipidana

JAKARTA (IM) - Dosen Universitas Presiden, Bekasi, Muh Ibnu Fajar Rahim mengajukan judicial review UU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ahli hukum pidana itu meminta saksi ahli dilindungi dan tidak bisa dituntut secara pidana dan perdata.

Menurut Muh Ibnu Fajar Rahim, menjadi ahli atau memberikan keterangan ahli merupakan kewajiban hukum yang dilakukan oleh seorang warga negara. Hal itu untuk berpartisipasi dalam proses peradilan untuk membantu penegak hukum dan para pencari keadilan dalam menemukan kebenaran materiil.

"Oleh karena itu, hak untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana maupun perdata merupakan hak fundamental bagi seorang ahli yang sama dengan profesi lainnya seperti pemberi bantuan hukum maupun advokat," ucapnya.

Muh Ibnu Fajar Rahim mencontohkan Pasal 11 UU Bantuan hukum yang berbunyi:

"Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung ja-

wabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Demikian juga Pasal 16 UU Advokat yang berbunyi: Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

"Baik ahli, advokat, maupun pemberi bantuan hukum termasuk saksi merupakan seseorang yang memberikan jasanya untuk kepentingan peradilan. Sehingga tidak adil bagi ahli apabila tidak diberikan perlindungan hukum yang serupa," tuturnya.

Hak untuk tidak dituntut secara hukum baik pidana atau perdata merupakan hak fundamental bagi seorang ahli yang telah memberikan keterangan dalam proses peradilan dengan itikad baik dan menjadi penting.

"Agar ahli dapat memberikan keterangan dengan bebas dan merdeka," pungkasnya. Permohonan ini sudah didaftarkan di kepaniteraan MK dan masih diproses. ● han

# 2 Polhukam

FOTO: IDN/ANTARA



## PERSIAPAN LOKASI KTT G20 DI BALI

Wisatawan beraktivitas di kawasan The Apurva Kempinski Bali yaitu hotel yang akan menjadi tempat pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Nusa Dua, Bandung, Bali, Minggu (6/11). Persiapan "venue" atau tempat pertemuan di hotel tersebut dinyatakan selesai dalam beberapa hari ke depan untuk lokasi pertemuan para kepala negara pada puncak KTT G20 15-16 November 2022.

# TV Analog Dimatikan Menuai Protes, Tak Semua Warga Mampu Belinya

Penghapusan siaran TN analog diprotes masyarakat. Dalam unggahan di Tik Tok, akun @Evaerpitarsari20, keputusan tersebut justru dinilai menyusahkan masyarakat.

JAKARTA (IM) - Kritik masyarakat atas kebijakan pemerintah mematikan siaran televisi analog dan kemudian beralih kesiaran digital, terus mengalir dari masyarakat. Salah satunya adalah lewat media sosial Tiktok.

Seperti diungkapkan satu warganet terkait kebijakan ini yang dinilai menyusahkan rakyat kecil. "Kasian rakyat kecil dan makin menyusahkan rakyat," kata akun @Wulandari879.20 di Tik Tok, dikutip Minggu (5/11).

Menurutnya, peralatan untuk TV digital tidak bisa dibeli oleh banyak orang. Terlebih situasi ekonomi saat ini masih belum pulih sepenuhnya

pascapandemi Covid-19. "Karena tidak semua orang mampu membeli alatnya. Kembalikan sinyalnya kembali, biar kami bisa menonton kembali," tulisnya.

Postingan ini dikomentari akun @Moc2n. Menurutnya, saat ini zaman masih susah. Kemudian ditambah lagi menonton televisi saat ini juga susah.

"Bener bngt teh.. jaman udh susah d tambah susah pengen liat TV jg," katanya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghentikan siaran TV analog atau analog switch off (ASO) di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabode-

tabek).

Dengan demikian, sejak Rabu, (2/11) pukul 24.00 WIB, masyarakat di daerah ini sudah tidak bisa lagi menonton siaran TV analog.

Penghapusan siaran TN analog mendapat reaksi keras dari warganet. Dalam unggahan di Tik Tok, akun @Evaerpitarsari20 menilai keputusan tersebut justru menyusahkan warga. "Menilai tega pemerintah teh nyusahkan rakyat kecil ngk semua mampu beli stb pak," tulisnya.

Tidak hanya itu, ia juga tidak bisa memberikan sangputri hiburan dengan menonton kartu di televisi.

"Biasanya liat tv liat kartun skrng mh katanya tv nya semua semua," tulisnya.

Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSREC, Pratama Persadha meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan Analog Switch Off (ASO) atau menyuntik mati TN analog dengan beralih ke TV digital.

Ia mengatakan bahwa ma-

syarakat yang kebingungan dengan kebijakan tersebut.

Selain itu, Faktanya tidak semua masyarakat memiliki set top box (STB) TV digital maupun televisi yang sudah berteknologi TV digital.

"Prinsipnya adalah jangan ada masyarakat yang dirugikan dengan program TV digital ini. Win win solution bagi semua pihak harus dipikirkan pemerintah, agar masyarakat tidak tiba-tiba kehilangan akses informasi," kata Pratama dalam keterangannya, Sabtu (5/11).

Menurutnya, program TV digital harus didukung dengan sosialisasi serta pemerataan hardware TV digital yang baik di

masyarakat. Misalnya program STB TV digital ini dibagikan secara luas ke masyarakat yang membutuhkan serta kesulitan membeli STB TV digital.

Bahkan bila perlu, lanjut dia, peredaran dan penjualan televisi di Indonesia wajib sudah support TV digital. Bagi televisi yang sudah terlanjur berada di toko sebagai stok, wajib dijual dengan bundling STB TV digital, agar saat dibeli masyarakat bisa digunakan dengan maksimal.

Sebagai informasi, harga satu unit STB TV digital yang beredar umum berharga di kisaran Rp150 ribu hingga Rp300 ribu dengan berbagai merek. ● han

## 22 Pati TNI AD Naik Pangkat, Tiga di Antaranya Jadi Bintang Dua

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman menerima laporan kenaikan pangkat 22 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD, di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution Lantai III Mabesad, Jakarta Pusat, Jumat (4/11).

Tiga perwira di antaranya mendapat kenaikan pangkat dar bintang satu menjadi bintang dua. Ketiganya adalah Pa Sahli Tk III Kasad Bidang Komsos, Mayjen TNI Widhoseno, Kapuskes TNI Mayjen TNI Guntoro, dan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unhan Mayjen TNI Mohammad Fajdar.

Selain mereka, terdapat 8 Pati menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen). Mereka adalah Dirkuad Brigjen TNI Garanta Singkali, Dirjanguk RSPAD Gatot Soebroto Brigjen TNI Iwan Darmawan Ma'mur, Kapoksahli Pangdam XII/Trp Brigjen TNI Kus Arisena, Dokter Ahli Bidang CVC RSPAD Gatot Soebroto Brigjen TNI Pontjo Yunarko, Kapoksahli Pangdam XIII/Mdk Brigjen TNI Theodorius Kawatu, Waaster Kasad Bidang Wanwil dan Kerma-

ter Brigjen TNI Hariyanto, Widyaiswara Bidang Tahnas Seskoad Brigjen TNI Masduki, serta Asops Kaskostrad Brigjen TNI Christian Kumi-anto Tehuteru.

Di samping itu, terdapat 11 Pati dengan jabatan di luar struktur TNI AD. Mereka adalah Dirum Akademi TNI Brigjen TNI Nur Budi Asmara, Kapuslitbang Sumdahan Baliitbang Kemhan Brigjen TNI Slamet Riyadi, Dir Rahkomhan Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI Bambang Sugiharto, Dir Fajas Ditjen Kuathan Kemhan Brigjen TNI Andri Tobarsono, Dir Jakstrahan Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI Yudhi Murfi.

Selanjutnya, Wakil Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan Brigjen TNI Suwamo, Dir Dal Proggar Ditjen Renhan Kemhan Brigjen TNI Rabimin, Karo Umum Unhan Brigjen TNI Ridwan Gunawan, Anggota Pokkimitama Mahkamah Agung Brigjen TNI Marwan Suliandi, Pa Sahli Tk. II Ekkus Sahli Bidang Ekkudag Panglima TNI Brigjen TNI Harzen Paine, serta Waaskomlek Panglima TNI Brigjen TNI Indra Gumay Fitri. ● mei

## Masa Bakti Anggota KPU Daerah Diusulkan Berakhir Serentak 2023

DENPASAR (IM) - Masa bakti anggota KPU provinsi dan kota/kabupaten yang menjabat sampai 2024 dan 2025 diusulkan berakhir serentak pada 2023. Usul ini rencananya akan dimasukkan menjadi bagian dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yang mulanya disusun untuk merespons pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

"Setelah nanti sekiranya di dalam Perppu ada aturan itu, maka pengisian jabatan atau seleksi anggota KPU Provinsi kabupaten/kota akan kita tata secara serentak. Untuk KPU Provinsi Mei 2023," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, di kantor KPU Bali, Sabtu (5/11).

Sementara itu, pengisian anggota KPU kota/kabupaten diusulkan pada Juli 2023. Baca juga: Nama 11 Anggota KPU Daerah dan Sekretariatnya Dicatut Jadi Kader Parpol Anggota KPU daerah yang seharusnya menjabat lebih lama dari itu akan diberikan kompensasi secara penuh sesuai periode masa jabatan yang seharusnya.

Penyesuaian masa bakti ini dilakukan dalam rangka desain

keserentakan pemilu mulai 2024 dan ke depannya. Sebab, saat ini, tanggal habis masa jabatan para anggota KPUD sangat bervariasi. Hasyim menjelaskan, rekrutmen yang tidak serentak ini menimbulkan kesulitan dalam persiapan dan pelaksanaan pemilu. Ia memberi contoh, di beberapa daerah, ada anggota KPU yang masa jabatannya habis mendekati pemungutan suara.

"Itu kan enggak ideal sama sekali. Kami sudah punya pengalaman mengatasi menghadapi situasi itu. Itu sangat tidak ideal, dan karena ada yang namanya azas atau prinsip akuntabilitas, siapa yang menyelenggarakan ya dia harus yang mempertanggungjawabkan," ucap Hasyim.

"Misalnya mengadakan pemungutan suara tapi yang bertanggung jawabkan hasilnya sudah (anggota) KPU baru dan bisa jadi orang-orangnya baru, itu sangat tidak ideal," imbuhnya.

Sesuai ketentuan, bila usul ini digolkan pemerintah dan DPR, maka seleksi pemilihan akan dimulai setidaknya pada Desember 2022. ● han



## CABOR ESPORTS PORPROV KALSEL PERTAMA DI INDONESIA

Tim esports bertanding dalam gim "Mobile Legends" pada Porprov XI Kalsel di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Minggu (6/11). Cabang olahraga esports pada Porprov XI Kalsel tersebut pertama kalinya digelar dari seluruh porprov di Indonesia, yang ditargetkan dapat menjadi percontohan bagi provinsi lainnya.